

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Nasional

1. Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Nurul Huda, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan akumulasi pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara atas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam waktu satu tahun dan diukur dengan nilai mata uang.

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Suatu negara diperkirakan memiliki pendapatan nasional tinggi apabila jumlah serta kualitas sumber daya manusia serta sumber daya alam melimpah.²¹ Nilai pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku merupakan nilai tambah

¹⁹ Sadono sukirno, *Makroekonomi...*, hlm. 36

²⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 21

²¹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku tiap tahun, sedangkan pendapatan nasional atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Pendapatan nasional atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.²²

2. Konsep tentang Pendapatan Nasional

Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dikelompokkan menjadi *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto, *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto, *Net National Product* (NNP) atau Produk Nasional Netto, *Net National Income* (NNI) atau Pendapatan Nasional Netto, *Personal Income* (PI) atau Pendapatan Perseorangan, dan *Disposable Income* (DI) atau pendapatan yang siap dibelanjakan.²³

a. *Gross Domestic Product* (Produk Domestik Bruto)

Merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara (domestik) ditambah dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing yang berada di negara tersebut selama satu tahun.²⁴

Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa di suatu negara, tentu tidak hanya milik penduduk negara tersebut saja, namun juga terdapat perusahaan multinasional yang merupakan milik negara lain.

²² Handy Ariwibowo, dkk, *Mudah Memahami dan Mengimplementasikan Ekonomi Makro Disertai Teori, Soal Diskusi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm.15

²³ Chabibah, *Ensiklopedia Pendapatan Nasional*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 4

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4

Perusahaan multinasional tersebut menyediakan faktor-faktor produksi seperti modal, teknologi serta tenaga kerja yang dapat membantu menambah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara serta menaikkan perhitungan pendapatan nasional.

b. *Gross National Product* (Produk Nasional Bruto)

Adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.²⁵ Jadi, GNP mengukur nilai barang dan jasa berdasarkan kepemilikan atau kewarganegaraan sedangkan GDP mengukur semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri tanpa membedakan kewarganegaraan.

c. *Net National Product* (Produk Nasional Netto)

Yaitu nilai GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal.²⁶ NNP dalam perhitungan pendapatan nasional menggunakan nilai investasi netto yaitu nilai investasi bruto dikurangi depresiasi.

d. *Net National Income* (Pendapatan Nasional Netto)

Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.²⁷ Nilai NNI diperoleh dari hasil pengurangan nilai NNP dengan pajak tidak langsung serta menambah subsidi.

²⁵Ibid., hlm. 5

²⁶Ibid., hlm. 5

²⁷Ibid., hlm. 6

e. *Personal Income* (Pendapatan Perseorangan)

Nilai *Personal Income* diperoleh dari NNI dikurangi pajak laba perusahaan, laba ditahan, dan dana pensiun lalu ditambah nilai *transfer payment* dan pendapatan bunga dari pemerintah.²⁸

f. *Disposable Income*

Merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk konsumsi serta untuk tabungan yang disalurkan menjadi investasi.²⁹ *Disposable Income* yaitu nilai *Personal Income* dikurangi pajak langsung, atau pajak yang ditanggung oleh setiap individu.

3. Perhitungan Pendapatan Nasional

Perhitungan pendapatan nasional dapat menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:³⁰

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dari barang dan jasa. Volume produksi dihitung menurut lapangan usaha dan dinilai dalam uang atas harga pasar yang berlaku.³¹ Pendekatan ini mencerminkan besarnya kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap pendapatan nasional dan menghindari perhitungan ganda.³²

²⁸Ibid., hlm. 6

²⁹Ibid., hlm. 7

³⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ed pertama*, (Kencana, 2016) hlm. 44

³¹ T. Gilarsu, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...*, hlm. 163

³² Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hlm. 44

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan empat komponen yaitu *rent* atau balas jasa atas faktor produksi yang disewa dan tanah, *wages* atau upah, *interest* atau bunga modal dan *profit* atau keuntungan. Pendekatan ini belum pernah digunakan di Indonesia.

c. Pendekatan Konsumsi

Pendekatan konsumsi merupakan pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan menghitung total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output nasional, diantaranya pengeluaran untuk barang-barang konsumsi, penanaman modal atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.³³

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional

a. Permintaan dan Penawaran Agregat

Permintaan agregat atau *Agregat Demand* (AD) adalah keseluruhan permintaan terhadap barang konsumsi dan investasi pada kesempatan kerja dan pendapatan nasional tertentu. Sementara penawaran agregat atau *Agregat Supply* (AS) adalah keseluruhan produksi pada volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional tertentu.³⁴

Permintaan agregat merupakan turunan dari model IS-LM yang menunjukkan interaksi antara pasar komoditas dan pasar uang yang dihubungkan oleh tingkat bunga dalam menentukan besarnya

³³Ibid., hlm. 45

³⁴Muhdar HM, "Perekonomian Nasional dan Internasional dalam Kerangka *Agregat Demand dan Supply*", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Buhuts*, Vol. 14, No. 2, 2018., hlm. 71-72

pendapatan nasional. Kurva permintaan agregat menunjukkan bahwa pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat harga. Terdapat dua pendapat mengenai pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perekonomian, yaitu³⁵:

1) *Keynes effect*

Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional melalui pengaruhnya terhadap penawaran uang nyata. Apabila tingkat harga menurun (deflasi), nilai riil uang yang beredar dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila terjadi inflasi dengan jumlah penawaran uang nominal yang sama, maka nilai riil uang yang beredar mengalami penurunan.

2) *Pigou effect*

Pigou menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai riil saldo kas. Apabila harga turun maka nilai riil saldo kas masyarakat meningkat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan dalam rumah tangga. Sehingga masyarakat mengurangi kelebihan saldo kasnya dengan menambah pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi yang meningkat ketika nilai pendapatan tetap mengakibatkan tingkat tabungan makin berkurang.

³⁵Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*, hlm. 100-104

Penawaran agregat menunjukkan hubungan antara nilai riil barang dan jasa dihasilkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga serta mencerminkan kondisi faktor-faktor produksi. Terdapat beberapa model yang menjelaskan penawaran agregat, yaitu:

1) Model Harga Kaku

Menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan karena adanya kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan mengenai harga barang atau karena struktur pasar dimana daftar harga barang telah dicetak dan didistribusikan, sementara mengubah harga akan membutuhkan biaya besar. Sehingga berapapun barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak mempengaruhi perubahan harga.³⁶

2) Model Upah Kaku

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa upah nominal adalah kaku dalam jangka pendek karena lambatnya penyesuaian upah nominal. Upah nominal biasanya ditetapkan oleh kontrak jangka panjang sehingga upah tidak dapat disesuaikan dengan cepat ketika kondisi ekonomi berubah. Model upah kaku (*sticky wage model*) menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat di mana ketika upah nominal tidak berubah, kenaikan harga akan menurunkan upah riil yang membuat tenaga kerja

³⁶N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi ...*, hlm. 366

menjadi lebih murah. Upah riil yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga perusahaan dapat memproduksi lebih banyak output.³⁷

3) Model Informasi Tak Sempurna

Pada model informasi tak sempurna diasumsikan jumlah barang begitu besar sehingga produsen hanya dapat mengamati harga barang yang mereka produksi dan kurang memantau harga barang yang mereka konsumsi. Informasi yang tidak sempurna tersebut menimbulkan kebingungan tentang berapa banyak barang yang akan mereka produksi untuk ditawarkan.³⁸

Keseimbangan AD-AS menunjukkan bahwa jika AD lebih besar dari AS, maka ada rangsangan bagi produsen untuk meningkatkan produksinya pada ada volume kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Jika AD lebih rendah dari AS, maka produsen akan mengurangi produksinya sehingga volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional menurun.³⁹

b. Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sementara tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Konsumsi merupakan komponen AD yang penting karena pengaruhnya sangat besar terhadap pembentukan output, dimana

³⁷Ibid., hlm. 368

³⁸Ibid., hlm. 371-372

³⁹Muhdar HM, "Perekonomian Nasional dan Internasional...", hlm. 72

konsumsi adalah output sama dengan *income* karena proses produksi pada hakekatnya menghasilkan barang dan jasa yang akan dibeli oleh rumah tangga berupa *Agregat Demand*. Selain itu, dalam proses produksi terdapat imbalan atas faktor produksi dimana imbalan tersebut menjadi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Namun tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi melainkan sebagian dari pendapatan tersebut disimpan dalam bentuk tabungan.⁴⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumsi dan tabungan mencerminkan imbalan terhadap faktor produksi, jadi ketika konsumsi dan tabungan mengalami kenaikan berarti terjadi kenaikan produksi barang dan jasa yang mencerminkan kenaikan pendapatan nasional.

c. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan maka biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin banyak pendapatan nasional suatu negara karena pengeluaran pemerintah meningkatkan permintaan agregat. Peningkatan pendapatan nasional sebagai efek pengeluaran pemerintah dijelaskan oleh adanya efek *multiplier* dimana

⁴⁰Ibid., hlm.72-73

pengeluaran pemerintah menggeser titik keseimbangan pada tingkat yang lebih tinggi⁴¹

d. Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Tujuan pengeluaran investasi adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan, sementara sumber pembiayaan untuk investasi diperoleh dari berbagai sumber pembiayaan dan keuangan yang tergantung pada harapan kondisi keuangan di masa mendatang.⁴²

Hal tersebut menyebabkan pengeluaran investasi sifatnya tidak stabil. Pengusaha akan memperkecil investasi ketika harapan untuk dapat menjual outputnya kecil. Akibatnya, keinginan untuk melakukan investasi turun dan dengan sendirinya pendapatan nasional juga turun. Turunnya pendapatan menyebabkan turunnya konsumsi. Karena konsumsi merupakan bagian dari pengeluaran, maka turunnya konsumsi akan menyebabkan pendapatan turun lagi dan seterusnya (*multiplier effect*).⁴³ Menurut teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pendapatan nasional dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin tinggi pendapatan suatu Negara, maka investasi yang tercipta akan semakin besar pula.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Nasir dan Diana Sari, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Nasional Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, November 2015, hlm. 97-98

⁴² Muhdar HM, "Perekonomian Nasional dan Internasional ...", hlm. 74-75

⁴³ Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku I...*, hlm. 83

⁴⁴ Muhammad Kholis, "Hubungan Antara Pendapatan Nasional...", hal. 65-78

e. Inflasi

Inflasi menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan nasional. Tingkat inflasi yang tinggi akan menghambat proses produksi dan berpengaruh pada perekonomian menjadi lesu. Sebaliknya inflasi yang stabil justru mempunyai pengaruh positif untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik karena masyarakat memiliki gairah untuk bekerja maupun berinvestasi sehingga berpengaruh pada pendapatan nasional. Pendapatan yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.⁴⁵ Kemudian menurut teori yang dijelaskan oleh Putong dan Andjaswati sebagaimana dikutip oleh Zakiah dan Umaruddin, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi tingkat inflasi mata uang, karena semakin banyak uang yang beredar.⁴⁶ Dengan demikian inflasi merupakan salah satu faktor pendapatan nasional.

f. Jumlah Uang beredar

Jumlah Uang beredar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Berdasarkan teori dari Keynes yakni penawaran uang (*Money Supply*) memiliki pengaruh positif terhadap uang beredar, bank Indonesia akan mengambil kebijakan suku bunga yang nantinya akan mendorong para investor untuk menginvestasikan uangnya dan kemudian akan memicu pendapatan

⁴⁵Suparmoko dan Irawan. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keenam. (Yogyakarta: BPFE, 2008)

⁴⁶Zakiah dan Umaruddin Usman, Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi..., hlm. 100

nasional.⁴⁷ Sejalan dengan teori dari Putong dan Andjaswati seperti dikutip oleh Zakiah dan Umaruddin tentang Inflasi, bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi tingkat inflasi mata uang, karena semakin banyak uang yang beredar.⁴⁸

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan gejala naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode tertentu yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumsi (IHK). Dapat dikatakan sebagai fenomena inflasi apabila tiga komponen berikut terpenuhi⁴⁹:

a. Kenaikan Harga

Harga suatu barang/komoditas dikatakan mengalami kenaikan apabila harga barang tersebut lebih tinggi dari pada periode sebelumnya yang dapat ukur dengan jarak waktu harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan maupun berdasarkan patokan musim.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga barang harus bersifat umum atau menyeluruh, dimana kenaikan harga suatu barangakan menyebabkan harga barang-barang lainnya mengalami kenaikan pula. Misalnya mesin-mesin industri dan kendaraan umum banyak yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), jadi ketika harga BBM naik, maka biaya operasional untuk

⁴⁷Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 236

⁴⁸Zakiah dan Umaruddin Usman, *Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi...*, hlm 100

⁴⁹Ekawarna dan Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hlm. 252

menjalankan mesin dan transportasi juga naik dan menyebabkan harga jual produk-produk industri serta komoditas lain yang menggunakan jasa angkutan turut naik.

c. Berlangsung Terus – Menerus

Kenaikan harga belum dapat dikatakan inflasi jika hal tersebut hanya terjadi sesaat. Maka dari itu, perhitungan inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan atau dalam rentang waktu lebih panjang seperti triwulan atau tahunan agar dapat dilihat apakah kenaikan harga tersebut bersifat umum dan terus menerus.

Inflasi dapat diukur dalam tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut⁵⁰:

$$\frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkat harga}_{t-1}} \times 100 = \text{Rate of Inflation}$$

2. Jenis – jenis Inflasi

a. Menurut Ekonom Islam *Taqiudin Ahmad ibn Al-Maqrizi* , inflasi digolongkan dalam dua bentuk, yaitu⁵¹:

1) *Natural Inflation*

Diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana manusia tidak mempunyai kendali atasnya yang disebabkan oleh turunnya Penawaran Agregat (AS) atau naiknya Permintaan Agregat (AD).
Jika memakai perangkat analisis konvensional dengan persamaan

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 136

⁵¹ Ibid., hlm. 140

identitas sebagai berikut: $MV = PT = Y$ Dimana : M = jumlah uang beredar V = kecepatan peredaran uang P = tingkat harga T = jumlah barang dan jasa Y = tingkat pendapatan nasional (GDP)

2) *Human Error Inflation*

Human Error Inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan kesalahan manusia itu sendiri. Penyebabnya bisa dikelompokkan sebagai berikut : 1) Korupsi dan administrasi yang buruk 2) Pajak yang berlebihan 3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan

b. Menurut persentasenya, inflasi dibagi menjadi jenis⁵², yaitu:

- 1) Inflasi ringan: merupakan inflasi yang lajunya kurang dari 10%.
- 2) Inflasi sedang: merupakan inflasi yang lajunya antara 10%-30%.
Inflasi ini juga dapat disebut sebagai inflasi dua digit dan ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar.
- 3) Inflasi berat: merupakan inflasi yang lajunya antara 30%-100%.
- 4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*): merupakan inflasi yang lajunya diatas 100%. Ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit dan masyarakat menjadi enggan menyimpan uang karena nilainya yang merosot tajam.

c. Menurut penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu⁵³:

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

⁵²Ekawarna dan Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hlm. 263

⁵³ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro...*, hlm. 152

Yaitu inflasi yang timbul karena permintaan agregat (keseluruhan) yang tinggi sedangkan produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*) mengakibatkan harga menjadi naik, sesuai dengan hukum permintaan dimana jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap maka harga akan naik.

2) Inflasi Dorongan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini timbul karena turunnya produksi yang disebabkan naiknya biaya produksi akibat tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara tersebut menurun, kenaikan harga barang baku produksi, adanya tuntutan kenaikan upah buruh dan sebagainya. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan produsen ketika biaya produksi naik yaitu langsung menaikkan harga produk dengan jumlah penawaran yang sama atau menurunkan jumlah produksi dan menyebabkan harga produk naik karena tarik menarik antara permintaan dan penawaran.

3. Teori Inflasi

Terdapat tiga teori inflasi yang menjadi patokan sebab dan solusi ketika inflasi terjadi, yaitu:⁵⁴

a. Teori Kuantitas

Teori ini dikenal sebagai model kaum monetaris. Menurut teori kuantitas, inflasi hanya akan terjadi apabila ada penambahan jumlah uang yang beredar, baik uang kartal maupun giral serta laju inflasi

⁵⁴Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 7-12

ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan keadaan psikologis masyarakat atau ekspektasi mengenai kenaikan harga dimasa yang akan datang. Kaum monetaris memandang inflasi sebagai fenomena moneter yang terjadi karena ekspansi jumlah uang beredar menyebabkan ketidakseimbangan dalam sektor moneter.

b. Teori Keynes

Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena tingginya tingkat permintaan masyarakat melebihi jumlah barang yang tersedia. Permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia akan menyebabkan harga secara umum naik. Proses inflasi akan berlangsung selama hal ini terus terjadi. Yang dimaksud dengan golongan masyarakat disini yaitu pemerintah, yang melakukan mencetakan uang baru untuk menutup defisit anggaran belanja negara, pengusaha swasta yang menambah investasi baru dengan kredit yang mereka peroleh dari bank, dan pekerja atau serikat buruh, yang menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

c. Teori Struktural

Menurut teori ini, inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter namun juga fenomena struktural yang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan struktur ekonomi. Gejala ekonomi baik dari luar negeri berupa utang luar negeri dan kurs valuta asing

maupun dari dalam negeri berupa kekakuan suplai dari sektor pertanian, kelangkaan devisa karena pertambahan barang ekspor lebih lambat dibandingkan barang impor, serta defisit anggaran akibat pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaan rutin dapat menyebabkan fluktuasi harga di pasar domestik.

4. Efek Inflasi

Terdapat beberapa efek dari adanya kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus atau inflasi dalam kegiatan ekonomi, antara lain⁵⁵:

a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Dari segi pendapatan, sebagian masyarakat ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Golongan masyarakat yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah masyarakat dengan pendapatan tetap, hal ini karena inflasi mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Contoh lain yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah orang atau pihak yang memberikan pinjaman uang dengan bunga lebih rendah daripada laju inflasi. Sedangkan golongan masyarakat yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan potensi yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi serta adanya serikat buruh yang

⁵⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm.32-34

kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi.

b. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*)

Inflasi juga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada.

c. Efek Terhadap Output (*Output Effects*)

Inflasi mungkin dapat menyebabkan kenaikan produksi karena ketika terjadi inflasi, kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun jika laju inflasi cukup tinggi (*hyper inflation*) sebaliknya akan terjadi penurunan output karena nilai uang rill turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang cash dan transaksi lebih mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan atau penurunan output. Intensitas efek inflasi berbeda-beda tergantung apakah inflasi dibarengi dengan

kenaikan produksi dan kesempatan kerja (*employment*) atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

Sementara dalam teori inflasi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena⁵⁶ :

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbenanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah.
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*,....., hlm. 139

C. Jumlah Uang Beredar

1. Pengertian Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang yang beredar dan mata uang dalam peredaran merupakan dua hal yang berbeda. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, yaitu uang kertas dan uang logam atau uang kartal. Adapun uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.

Jumlah uang beredar berkaitan dengan penawaran uang dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, artinya semakin besar uang yang ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah jumlah uang yang beredar, artinya semakin sedikit uang yang ditawarkan. Jenis uang yang beredar di Indonesia saat ini adalah⁵⁷:

a. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1)

Merupakan jumlah uang beredar yang sering digunakan untuk keperluan transaksi, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas yang biasa disebut uang kartal serta uang giral yaitu deposito yang terdapat pada bank umum dan dapat dikeluarkan menggunakan cek, atau dapat ditulis dengan rumus berikut:

$$M_1 = C + DD$$

Dimana : M_1 = uang dalam arti sempit

⁵⁷ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 158

C = *currency*, uang kartal

DD = *demand deposit*, uang gilral

b. Jumlah uang yang beredar dalam arti luas (M_2)

Adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari M_1 ditambah dengan uang kuasi/*near money*. *Near money* adalah rekening tabungan dan kekayaan lain yang dicairkan dalam waktu dekat. Misalnya deposito yang ditukarkan dengan uang kontan tanpa kehilangan nilainya. Jumlah uang yang beredar dalam arti luas bisa ditulis dengan rumus:

$$M_2 = M_1 + TD + TS$$

Dimana : M_2 = uang dalam arti luas

M_1 = uang dalam arti sempit

C = *currency*, uang kartal

DD = *demand deposit*, uang gilral

2. Teori Jumlah Uang Beredar

a. Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang merupakan pokok kekuatan atas pernyataan bahwa sektor moneter tidak ada hubungannya dengan sektor riil, dimana bertambahnya jumlah uang akan mengakibatkan pertambahan harga saja dan tidak mengubah output yang dihasilkan. Inilah yang disebut dengan *Classical dichotomy*, yaitu pemisahan sektor moneter dengan sektor riil dimana sektor moneter tidak ada hubungan dengan sektor riil dan uang hanya merupakan tudung dalam perekonomian.⁵⁸

⁵⁸Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku 1 ...*, hlm. 72 -73

b. Teori Irving Fisher

Teori Irving Fisher menjelaskan bahwa selain dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, kenaikan harga barang juga dipengaruhi kecepatan dari peredaran uang tersebut. Jadi ketika kecepatan uang beredar tinggi, maka akan terjadi kenaikan harga barang, sebaliknya ketika kecepatan peredaran uang rendah maka akan terjadi penurunan harga barang. Menurut Fisher, permintaan akan uang meningkat jika kebutuhan uang untuk transaksi meningkat yang dikaitkan dengan besarnya volume perdagangan karena sifat uang yang likuid sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi.⁵⁹

c. Teori *Cambridge (Marshall Equation)*

Teori *Cambridge* dikemukakan oleh Alfred Marshall yang merupakan ekonom dari universitas Cambridge. Menurut Marshall, seseorang memilih memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai karena mudah dalam bertransaksi dan bersifat likuid. Teori ini menjelaskan bahwa apabila jumlah uang naik dua kali, harga juga akan naik dua kali sampai permintaan akan uang sama dengan jumlah uang. Apabila jumlah uang naik dua kali, maka masyarakat akan kelebihan uang yang dipegang. Mereka akan membelanjakan kelebihan uang ini sampai jumlah uang yang diinginkan untuk dipegang sama dengan jumlah uang yang ada. Hal itu terjadi apabila output naik dua kali.⁶⁰

⁵⁹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 42

⁶⁰Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku 1 ...*, hlm. 76

d. Teori Keynes

Keynes berpendapat bahwa uang bukan hanya alat untuk bertransaksi (*means of transactions*) tapi juga penyimpan nilai (*store of value*). Pendapat tersebut mendasari motif permintaan uang Keynes yaitu bahwa selain untuk kepentingan transaksi dan berjaga-jaga juga untuk kepentingan spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dimana semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi maka permintaan uang untuk kebutuhan transaksi meningkat. Uang juga dibutuhkan untuk menyediakan dana khusus untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu diluar perencanaan. Selain itu, perlunya melakukan antisipasi terhadap faktor-faktor yang bersifat ketidakpastian dan harapan di masa depan mendorong permintaan uang untuk spekulasi. Terdapat dua bentuk alternatif masyarakat dalam memegang kekayaannya yaitu dalam bentuk uang kas dan obligasi di mana uang kas memberikan kemudahan dalam bentuk likuiditas untuk transaksi ekonomi sedangkan obligasi memberikan keuntungan berupa pendapatan bunga.⁶¹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar tersebut adalah⁶²:

a. Keadaan Neraca Pembayaran (*Surplus* atau *Defisit*)

Ketika neraca pembayaran dalam keadaan *surplus*, maka hal tersebut menunjukkan ada devisa yang masuk ke dalam negara yang artinya

⁶¹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter, ...*, hlm. 52

⁶²Ibid., hlm. 86

ada penambahan jumlah uang beredar. Sedangkan ketika neraca pembayaran dalam keadaan defisit, berarti ada pengurangan terhadap devisa negara dan pengurangan terhadap jumlah uang beredar.

b. Keadaan APBN (*Surplus* atau *Defisit*)

Apabila APBN mengalami defisit, maka pemerintah akan mencetak uang baru. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah uang beredar. Sedangkan jika APBN mengalami *surplus*, maka sebagian uang beredar masuk ke kas negara dan mengakibatkan jumlah uang beredar berkurang.

c. Perubahan Kredit Langsung Bank Indonesia

Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan kepada bank-bank umum dan kepada lembaga-lembaga pemerintah seperti Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adanya perubahan kredit langsung ini berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah uang beredar.

d. Perubahan Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank umum dalam rangka mengatasi krisis likuiditas pada bank-bank umum tersebut yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah sehingga jumlah uang beredar melonjak atau mengalami penambahan.

D. Investasi

1. Pengertian Investasi.

Pengertian Investasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 13 dalam standar akuntansi keuangan per 1 Oktober 2004, yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁶³

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.⁶⁴ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan modal suatu perusahaan untuk membeli barang-barang produksi atau asset agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

⁶³ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 2

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi...*, hlm. 121

2. Jenis-Jenis Investasi

- a. Menurut Sadono, jenis-jenis investasi terbagi atas dua yaitu⁶⁵ :
 - 1) Investasi yang terdorong yaitu investasi yang diadakan akibat penambahan permintaan, penambahan permintaan yang diakibatkan penambahan pendapatan.
 - 2) Investasi otonomi yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena penambahan permintaan efektif.
- b. Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu⁶⁶:
 - 1) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pengertian PMA dari tinjauan dan pembahasan Undang Undang nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal dan kredit luar negeri, yaitu⁶⁷:

 - a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan

⁶⁵Ibid, hlm. 108

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat 1

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 2

pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- b) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari danya investasi asing bagi kita ialah diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.⁶⁸ Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.

2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

⁶⁸ Suparmoko dan Irawan, *Ekonomika Pembangunan...*, hlm. 114.

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.⁶⁹ Perbedaan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional dapat dilihat dari kepemilikan modalnya. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan nasional apabila sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang di tanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Dan bila dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka sekurang kurangnya persentase 51% dari jumlah sahamnya harus saham atas nama. Berdasarkan ketentuan berlaku, persentase itu harus selalu ditingkatkan sehingga menjadi sebesar 74% pada tanggal 1 Januari 1974, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah termasuk perusahaan asing.⁷⁰

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu dapat menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri, memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

3. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat 2..

⁷⁰ Rai Wijaya, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 23

- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi⁷¹:

- a. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*)

Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal mencerminkan tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya manusia, maupun tingkat teknologi yang digunakan perusahaan. sementara kondisi eksternal adalah perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional dan kebijakan pemerintah.

- b. Tingkat Bunga

Bunga pinjaman merupakan salah satu biaya dalam investasi. Semakin tinggi biaya pinjaman, maka akan berdampak pada biaya investasi yang semakin besar pula.

- c. Ketersediaan Faktor-Faktor Produksi

Ketika faktor-faktor produksi yang tersedia meliputi tenaga kerja dan kekayaan semakin banyak dan mudah diperoleh, maka semakin lancar proses produksi berjalan. Sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi.

⁷¹ Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12

d. Pangsa Pasar

Pangsa pasar atau peluang pasar merupakan faktor utama yang yang menjadi perhatian investor, dimana semakin besar pangsa pasar yang tersedia, peluang investasi untuk berkembang akan semakin besar.

e. Iklim Usaha yang Kondusif, Termasuk Keamanan dan Stabilitas Politik.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Selain itu keamanan dan stabilitas politik akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya.

E. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁷² Pengeluaran pemerintah (Government Expenditures) tercermin dalam APBN termasuk Belanja Negara yang berarti kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.⁷³

⁷²Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik ...*, hlm. 169

⁷³ Bank Indonesia, *Meta Data : Operasi Keuangan Pemerintah Pusat*, dalam www.bi.go.id diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 21.10 wib

Menurut Sukirno pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Teori-teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ini menjelaskan keterkaitan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial.⁷⁴

⁷⁴Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik ...*, hlm. 170

b. Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner

Teori Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Wagner mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat diantaranya tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan demokrasi dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah.⁷⁵

c. Teori Pengeluaran Pemerintah Keynes

Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Dengan demikian pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada empat komponen: konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Pada perekonomian tertutup, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan $Y=C+I+G$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa G atau pengeluaran pemerintah memiliki peran terhadap pencapaian kegiatan perekonomian melalui kebijakan pemerintah guna mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga pemerintah perlu menambah

⁷⁵ Ibid., hlm 179

pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan.⁷⁶

d. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar.⁷⁷

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian menurut

John F. Due⁷⁸ :

- a. Produksi, pemerintah dapat memengaruhi tingkat GNP (Gross National Product) nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran, misalnya pendidikan. Juga melalui program-program pembiayaannya yang dapat mengubah kesediaan para pemilik faktor untuk menyediakan faktor-faktor tersebut.

⁷⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi...*, hlm. 211

⁷⁷ Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik...*, hlm. 173

⁷⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 214

- b. Distribusi, pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan - keuntungan disatu pihak. dan pengurangan pendapatan riil dari sektor swasta dilain pihak, yang hasil akhirnya adalah satu pola pendapatan yang lain daripada bila tidak ikut campur tangan dari pemerintah.
- c. Konsumsi, pemerintah mengalokasikan kembali sumber sumber ekonomi dari berbagai barang ke barang-barang atau jasa-jasa lainnya dengan memproduksi barang umum dan barang-barang/jasa-jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan pemindahan ini mengubah alokasi dari sumber - sumber ekonomi karena masing-masing para pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak-pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan relokasi dari sumber-sumber ekonomi. Pemerintah data memengaruhi efisiensi dalam perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Keseimbangan Perekonomian, dilihat dari efek terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dinyatakan bahwa program-program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian full employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian, dan karenanya mengubah GNP. Program-program tersebut dapat juga memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

F. Hubungan Pendapatan Nasional dengan Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Berdasarkan teori dari Keynes bahwa motif permintaan uang selain untuk kepentingan transaksi dan berjaga-jaga juga untuk kepentingan spekulasi. Hal tersebut karena harapan di masa depan berupa keuntungan dalam bentuk pendapatan bunga.⁷⁹ Keynes juga berpendapat bahwa penambahan jumlah uang beredar karena mempengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Karena adanya motif spekulasi, maka kenaikan tingkat bunga akan mendorong para investor untuk menginvestasikan uangnya dan kemudian akan memicu pendapatan nasional.⁸⁰

Berdasarkan perspektif Syariah, suku bunga hanya mewujudkan pembangunan ekonomi yang bersifat semu, dimana peningkatan volume transaksi yang tercipta akibat adanya bunga tanpa diiringi peningkatan jumlah produksi barang dan jasa direspon oleh peningkatan inflasi saja dan tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga kebijakan moneter menurut Islam pada dasarnya adalah menjaga agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif, atau dengan kata lain, uang beredar didorong mengalir ke sektor riil agar jumlah barang dan jasa ikut meningkat dan meningkatkan pendapatan nasional.⁸¹

Larangan menimbun harta dan menganjurkan untuk mengalirkan uang

⁷⁹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter, ...*, hlm. 52

⁸⁰Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...* hlm., 236

⁸¹Solikin M. Juhro, dkk, *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda Teori dan Praktik*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 3

beredar pada sektor riil untuk mencegah inflasi dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dijelaskan dalam kandungan surat At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Qs. At-Taubah: 34)*⁸²

Sementara menurut teori kuantitas uang, sektor moneter tidak ada hubungannya dengan sektor riil, dimana bertambahnya jumlah uang akan mengakibatkan pertambahan harga saja dan tidak mengubah output yang mencerminkan pendapatan nasional. Inilah yang disebut dengan *classical dichotomy*, yaitu pemisahan sektor moneter dengan sektor riil dimana sektor moneter tidak ada hubungan dengan sektor riil dan uang hanya merupakan tudung dalam perekonomian.⁸³

Menurut Fisher, besarnya volume perdagangan karena peningkatan pendapatan nasional akan menyebabkan permintaan uang untuk transaksi meningkat yang dikaitkan karena sifat uang yang likuid sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi.⁸⁴ Teori *Cambridge* dikemukakan

⁸² Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi : Makna Global dan Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 48-49

⁸³ Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku 1 ...*, hlm. 72 -73

⁸⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter...*, hlm. 42

oleh Alfred Marshall yang merupakan ekonom dari universitas Cambridge. Menurut Marshall, seseorang memilih memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai karena mudah dalam bertransaksi dan bersifat likuid.⁸⁵

G. Hubungan Pendapatan Nasional dengan Inflasi

Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional melalui pengaruhnya terhadap penawaran uang nyata. Apabila tingkat harga menurun (deflasi), nilai riil uang yang beredar dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila terjadi inflasi dengan jumlah penawaran uang nominal yang sama, maka nilai riil uang yang beredar mengalami penurunan.⁸⁶ Sehingga inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan nasional dimana inflasi menyebabkan nilai riil uang turun dan menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional.

Pengaruh inflasi terhadap pendapatan nasional dapat dijelaskan oleh teori upah kaku, dimana besarnya upah nominal biasanya ditetapkan oleh kontrak jangka panjang sehingga upah tidak dapat disesuaikan dengan cepat ketika kondisi ekonomi berubah, misalnya ketika terjadi inflasi yang menyebabkan nilai penjualan meningkat. Model upah kaku (*sticky wage model*) menunjukkan implikasi di mana ketika upah nominal tidak berubah, kenaikan harga atau inflasi akan menurunkan upah riil yang membuat tenaga kerja menjadi lebih murah. Upah riil yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga perusahaan

⁸⁵Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku 1 ...*, hlm. 76

⁸⁶Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*, hlm. 100-102

dapat memproduksi lebih banyak output dan meningkatkan pendapatan nasional.⁸⁷

Selain itu, inflasi yang stabil mempunyai pengaruh positif untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik karena masyarakat memiliki gairah untuk bekerja maupun mengadakan investasi sehingga berpengaruh pada pendapatan nasional. Pendapatan yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.⁸⁸ Permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia akan menyebabkan harga secara umum naik. Proses inflasi akan berlangsung selama hal ini terus terjadi.⁸⁹ Kemudian menurut teori yang dijelaskan oleh Putong dan Andjaswati seperti yang dikutip oleh Zakiah dan Umaruddin, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi tingkat inflasi mata uang, karena semakin banyak uang yang beredar.⁹⁰

Menurut teori kuantitas atau yang dikenal sebagai model kaum monetaris, inflasi hanya akan terjadi apabila ada penambahan jumlah uang yang beredar, baik uang kartal maupun giral serta laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan keadaan psikologis masyarakat atau ekspektasi mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Kaum monetaris memandang inflasi sebagai fenomena moneter yang

⁸⁷N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi ...*, hlm. 368

⁸⁸Suparmoko dan Irawan. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keenam. (Yogyakarta: BPFE, 2008)

⁸⁹ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi...*, hlm.11-12

⁹⁰Zakiah dan Umaruddin Usman, *Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi...*, hlm. 100

terjadi karena ekspansi jumlah uang beredar menyebabkan ketidakseimbangan dalam sektor moneter.⁹¹

H. Hubungan Pendapatan Nasional dengan Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Tujuan investasi adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan, sementara sumber pembiayaan untuk investasi diperoleh dari berbagai sumber pembiayaan dan keuangan yang tergantung pada harapan kondisi keuangan di masa mendatang.⁹²

Hal tersebut menyebabkan pengeluaran investasi sifatnya tidak stabil. Pengusaha akan memperkecil investasi ketika harapan untuk dapat menjual outputnya kecil. Akibatnya, keinginan untuk melakukan investasi turun dan dengan sendirinya pendapatan nasional juga turun. Turunnya pendapatan menyebabkan turunnya konsumsi. Karena konsumsi merupakan bagian dari pengeluaran, maka turunnya konsumsi akan menyebabkan pendapatan turun lagi dan seterusnya (*multiplier effect*).⁹³

Ekspektasi keuntungan suatu proyek investasi mencerminkan *time value of money*, dimana uang sekarang lebih tinggi nilainya dibanding uang yang akan datang, sehingga pelaku ekonomi menginvestasikan uangnya dengan tujuan agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tetapi berdasarkan akhlaq ekonomi Islam, secara ekstrem investor akan tetap

⁹¹ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 8-9

⁹² Muhdar HM, "Perekonomian Nasional dan Internasional ...", hlm. 74-75

⁹³ Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku I...*, hlm. 83

berinvestasi meski tidak ada *return*, karena tujuan investasi tersebut untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain karena investasi akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan kenaikan pendapatan.⁹⁴

Menurut teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pendapatan nasional dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka investasi yang tercipta akan semakin besar pula.⁹⁵ Sukirno mengemukakan teori yang menyatakan bahwa diantara jenis investasi adalah investasi yang diadakan akibat penambahan permintaan, penambahan permintaan yang diakibatkan penambahan pendapatan.⁹⁶ Sehingga ketika pendapatan nasional meningkat, maka akan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa yang akhirnya mendorong investasi. Teori yang dikemukakan Fransiskus Paulus Paskalis Abi bahwa faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya pangsa pasar dan tingkat pengembalian yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi eksternal salah satunya pertumbuhan ekonomi domestik yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional.⁹⁷

I. Hubungan Pendapatan Nasional dengan Pengeluaran Pemerintah

Menurut teori pengeluaran pemerintah Wagner, apabila pendapatan nasional meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat diantaranya tuntutan peningkatan

⁹⁴ Solikin M. Juhro, dkk, *Kebijakan Moneter Syariah...*, hlm. 73

⁹⁵ Muhammad Kholis, "Hubungan Antara Pendapatan Nasional...", hal. 65-78

⁹⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi ...*, hlm.108

⁹⁷ Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat dengan Pasar Modal...*, hlm. 12

perlindungan keamanan dan pertahanan.kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan demokrasi dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah.⁹⁸ Sementara Peacock dan Wiseman mengemukakan teori bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar.⁹⁹

Keynes mengemukakan teori bahwa pada perekonomian tertutup, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan $Y=C+I+G$, dimana pendapatan nasional (Y) ditentukan oleh pengeluaran konsumsi (C), investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran terhadap pencapaian kegiatan perekonomian melalui kebijakan pemerintah guna mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga pemerintah perlu menambah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan.¹⁰⁰

Sedangkan menurut John F.Due, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian diantaranya dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran,

⁹⁸ Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik ...*, hlm 179

⁹⁹ Ibid., 173

¹⁰⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi...*, hlm. 211

misalnya pendidikan serta melalui program-program pembiayaannya yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi distribusi pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional.¹⁰¹

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan pembahasan yang berhubungan dengan inflasi, jumlah uang beredar, investasi, pengeluaran pemerintah dan PDB, diantaranya sebagai berikut:

1. Wildan Shohabi¹⁰² melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional, inflasi dan pendapatan nasional serta antara pengeluaran pemerintah dan inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Data yang digunakan merupakan data tahunan periode 1963 hingga 2013 yang dianalisis dengan metode kausalitas Granger dan *Error Correction Model* (ECM). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang berlaku dua arah (*feedback*). Kausalitas satu arah terjadi dari pendapatan nasional ke pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan berlaku kausalitas dua arah dalam jangka panjang. Kausalitas inflasi dan pendapatan nasional dalam jangka pendek berlaku dua arah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel yang digunakan dan metode analisis kausalitas granger, namun

¹⁰¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 214

¹⁰² Wildan Shohabi, "Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Pendapatan Nasional di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 2, 2014

penelitian yang akan dilakukan menambahkan variabel jumlah uang beredar dan investasi untuk diteliti serta tidak menggunakan metode ECM.

2. Muhammad Nasir dan Diana Sari¹⁰³ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan lembaga lainnya periode 1995 hingga 2012 yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan semakin besar pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk maka pendapatan nasional Indonesia juga akan meningkat. Hubungan antara pendapatan nasional Indonesia dengan pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk tergolong sangat erat dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,9852. Selanjutnya sebesar 98,07 persen pendapatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk, sedangkan sisanya 1,93 persen lagi dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari variabel pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional yang

¹⁰³Muhammad Nasir dan Diana Sari, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Nasional Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, November 2015, hlm. 93-104

diteliti, sementara perbedaannya yaitu tidak meneliti variabel ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk serta metode yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ischak P. Lumbantobing¹⁰⁴ bertujuan untuk meneliti pengaruh investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1999 hingga 2014 yang dipublikasikan oleh BPS provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan yaitu model regresi linier berganda dan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta, investasi luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari variabel yang diteliti, namun penelitian ini dilakukan di daerah provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mencakup skala nasional serta menggunakan metode kausalitas Granger.
4. Chesi I.P Mentang, Vekie A. Rumat, dan Dennij Mandej¹⁰⁵ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit investasi dan jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* periode 2010 kuartal 1 hingga

¹⁰⁴ Ischak P. Lumbantobing, "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta", *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 125-142

¹⁰⁵ Chesi I.P Mentang, et. al., "Pengaruh Kredit Investasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*. Vol. 18 No. 02, 2018

2017 kuartal 4 yang dianalisis menggunakan metode error correction model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, kredit investasi dan jumlah uang beredar tidak signifikan terhadap PDB, sedangkan dalam jangka panjang, kredit investasi berpengaruh negatif signifikan dan jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap PDB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel jumlah uang beredar dan PDB yang diteliti sedangkan perbedaannya penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan variabel investasi berdasarkan PMA dan PMDN serta dianalisis menggunakan uji kausalitas Granger periode 2008 - 2019.

5. Nindya Eka Santi, Aisyah Jumiarti, Fivien Muslihatinningsih¹⁰⁶ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB, investasi dengan PDRB, dan tenaga kerja dengan PDRB dalam lingkup Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jember dan sekitarnya. Data yang digunakan yaitu data panel periode 2000 hingga 2014 yang dianalisis dengan metode uji analisis kausalitas granger. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB serta antara tenaga kerja dengan PDRB. Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan serta variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan PDB yang diteliti. Perbedaannya penelitian yang akan penulis

¹⁰⁶Nindya Eka Santi, et. al., "Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya", *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 6-10

lakukantidak meneliti variabel tenaga kerja dan dalam lingkup nasional sedangkan penelitian ini hanya dalam lingkup daerah.

6. Ach. Zuhri¹⁰⁷ melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis kausalitas dan kointegrasi antara pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDB, inflasi, jumlah uang beredar (JUB) dan sukuk. Data yang digunakan merupakan data triwulanan periode 2009-2017 yang dianalisis dengan uji kausalitas Granger dan uji kointegrasi Johansen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kointegrasi antara variabel PDB, inflasi, JUB dan sukuk yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dalam jangka panjang. Sementara hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara inflasi dan PDB, terdapat hubungan satu arah antara JUB dan PDB, terdapat hubungan satu arah antara sukuk dan PDB, tidak terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan JUB serta antara inflasi dan sukuk, terakhir terdapat hubungan dua arah antara JUB dan sukuk. Persamaan penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu PDB, inflasi dan jumlah uang beredar serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah variabel sukuk yang tidak diteliti pada penelitian yang akan dilakukan serta periode penelitian.
7. Zakiah dan Umaruddin Usman¹⁰⁸ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan jumlah uang beredar, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Data yang digunakan

¹⁰⁷Ach. Zuhri, “*Analisis Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Sukuk di Indonesia: Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Kausalitas Granger*”, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

¹⁰⁸Zakiah dan Umaruddin Usman, Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi..., hlm. 98-108

merupakan data *time series* periode 1996 hingga 2017 dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dianalisis menggunakan model dinamis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah uang beredar dan pendapatan nasional. Kemudian inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan nasional. Sedangkan kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan nasional. Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dan penelitian ini adalah pada variabel jumlah uang beredar, inflasi dan pendapatan nasional yang diteliti. Sementara perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis lakukan tidak meneliti variabel nilai tukar rupiah dan menggunakan metode kausalitas granger, sedangkan penelitian ini menggunakan model dinamis.

8. Ataina Zulfa Nasution, Nurlaila, Zainul Fuad¹⁰⁹ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap pengangguran. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2011 hingga 2018 yang dianalisis menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap

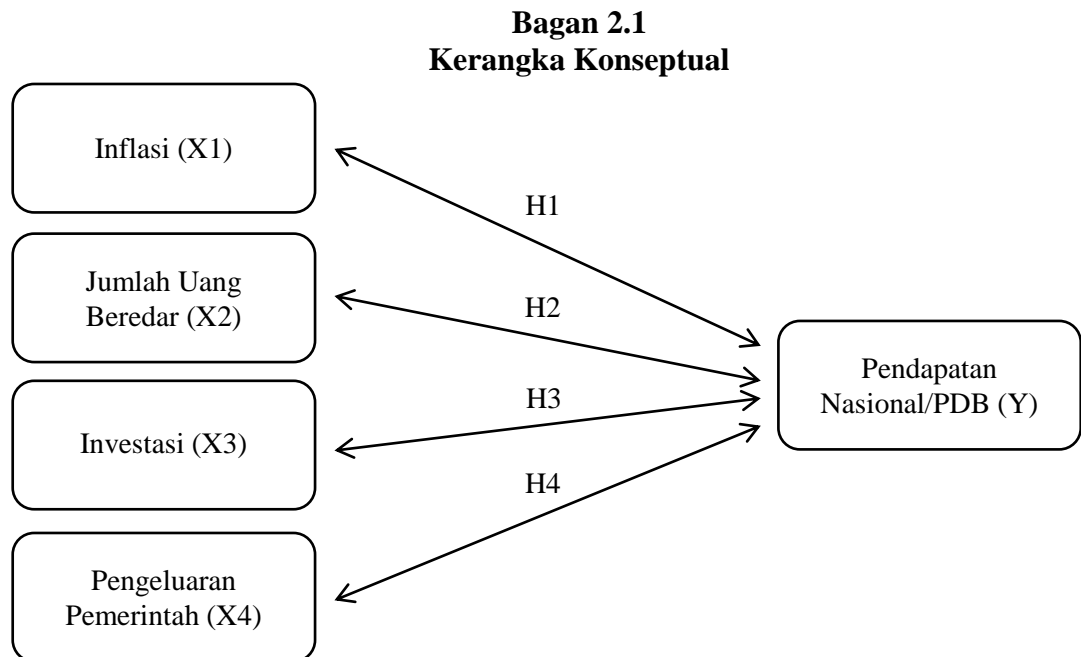
¹⁰⁹ Ataina Zulfa Nasution, et. al., “Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampak Terhadap Pengangguran”, *Jurnal Eknis*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 242-253

pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, investasi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan PDB, sedangkan perbedaannya adalah variabel pengangguran yang tidak digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan serta metode analisis yaitu uji kasualitas Granger.

9. Asila Murdiah dan Prasetyo Ari Wibowo¹¹⁰ melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan arah hubungan diantara variabel investasi, pendapatan nasional, dan jumlah uang beredar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series kuartalan periode 2007 hingga 2015 dengan metode VECM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pendapatan nasional dan investasi. Variabel pendapatan nasional dan jumlah uang beredar juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Sementara antara variabel investasi dan jumlah uang beredar tidak terdapat kausalitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari metode yang digunakan dan variabel yang diteliti. Namun perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis lakukan menambahkan variabel inflasi dan pengeluaran pemerintah serta periode penelitian adalah tahun 2008 hingga 2019.

¹¹⁰Asila Murdiah dan Prasetyo Ari Wibowo, "Analisis Kausalitas antara Investasi, Pendapatan Nasional, dan Jumlah Uang Beredar", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 1, Januari 2020, hlm. 606-615

K. Kerangka Konseptual



L. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah.

Hipotesis yang digunakan untuk menguji “Kausalitas Pendapatan Nasional Terhadap Perekonomian Indonesia” adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan pendapatan nasional (PDB)

H2: Terdapat hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dan pendapatan nasional (PDB)

H3: Terdapat hubungan kausalitas antara investasi dan pendapatan nasional (PDB)

H4: Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional (PDB)